BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Aktivitas *media relations* berperan penting dalam membentuk reputasi instansi di mata masyarakat. *Media relations* sendiri merupakan salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh hubungan masyarakat (humas) atau *public relations* dalam menjalin hubungan baik dengan pihak eksternal yaitu media massa untuk mempermudah dalam proses penyebaran informasi mengenai instansi kepada publik. Hal ini dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) yang salah satunya dikelola oleh Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan (Makopim) yang berada di bawah Biro Administrasi Pimpinan (ADPIM) pada Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sumbar. Bagian Makopim berfungsi untuk memberitakan informasi terkait kebijakan dan kegiatan dari pimpinan Provinsi Sumbar seperti gubernur, wakil gubernur, dan sekretaris daerah kepada masyarakat serta menjalin hubungan baik dengan media massa. Program kerja serta kebijakan yang dilakukan oleh instansi pemerintahan tidak jarang menjadi kritikan apabila dianggap tidak sesuai bagi masyarakat, hal ini yang akhirnya seringkali menjadi ancaman bagi reputasi instansi yang berpengaruh pada kepercayaan masyarakat kepada instansi tersebut.

Tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) Biro Administrasi Pimpinan (ADPIM) terutama pada Bagian Makopim biasanya mencakup berbagai fungsi yang mendukung kinerja efektif dan efisien dari pimpinan Pemprov Sumbar yang berfokus pada publikasi dan dokumentasi kegiatan pimpinan. Dijelaskan pada

Perjanjian Kerjasama (PKS) Biro ADPIM dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Sumbar Tahun 2022 bahwa Biro Administrasi Pimpinan bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi dan koordinasi kegiatan-kegiatan terkait dengan pimpinan, termasuk perencanaan, monitoring, dan pelaporan terkait kegiatan pimpinan. Sementara itu, Makopim bertanggung jawab atas penyediaan informasi, pembuatan materi, peliputan kegiatan dan penulisan *release* pada kegiatan pimpinan serta pengelolaan komunikasi internal dan eksternal yang melibatkan pimpinan, termasuk penyiapan pidato, penyusunan laporan, manajemen dan monitoring media, dan menjaga hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan (*stakeholder*). Biro ADPIM bekerja secara terintegrasi untuk mendukung pimpinan dalam menjalankan perannya dengan efektif dan meningkatkan citra dan reputasi serta komunikasi organisasi secara keseluruhan.

Manajemen pemberitaan yang bagus oleh media merupakan hal yang harus dilakukan oleh humas, karena berita dapat berpengaruh kepada citra dan reputasi instansi. Dalam hal ini, perlu dilakukan kegiatan *media relations* untuk membangun hubungan yang baik dengan rekan-rekan wartawan dari media. Antara humas dan wartawan saling membutuhkan satu sama lain. Media adalah mitra abadi bagi humas, keduanya saling membutuhkan. Media dapat membantu humas dalam menyebarkan informasi bagi khalayak atau masyarakat tentang apa yang ingin disampaikan oleh humas, dan sebaliknya, wartawan membutuhkan asupan berita yang bisa didapatkan dari humas (Kriyantono, 2012:25). Adanya kemungkinan bahwa wartawan secara ideal lebih tertarik kepada berita buruk yang terjadi pada sebuah instansi, maka *public relations* yang dalam pemerintahan

lebih dikenal sebagai humas harus menjalin hubungan yang baik dengan rekan-rekan wartawan dari media. Kemungkinan akan munculnya pemberitaan yang buruk terhadap pemerintah terbilang cukup besar karena berita dapat berasal dari mana saja. Maka dari itu, tugas penting bagi seorang humas untuk menjaga agar tidak muncul informasi negatif yang disebarluaskan di media (Darmastuti, 2012:74).

Adanya pemberitaan negatif ini juga dialami oleh Biro ADPIM Setdaprov Sumbar, dilansir pada laman liputan6.com (Novi Harlina; Selasa,9/5/2023), hal terkait berita adanya dugaan maladministrasi pada kasus pengusiran dan pelarangan belasan jurnalis saat meliput acara pelantikan Wakil Wali Kota Padang. Selain adanya indikasi penyalahgunaan wewenang, pihak Pemprov juga diduga tidak memiliki prosedur yang jelas dalam peliputan kegiatan pemerintahan. Kasus tersebut menjadi sorotan yang akhirnya berujung pada pemberitaan di berbagai media yang ada, baik media cetak maupun media *online* seperti pada artikel pada Kompas.com dengan judul “Jurnalis Sumbar Demo dan Lapor Polisi Seusai Pengusiran oleh Staf Pemprov”, Padang Ekspres dengan judul “Organisasi Pers Minta Pemprov Tindak Pengusiran Jurnalis saat Pelantikan Wawako”, TribunSumbar dengan judul “Belasan Pemred Embargo, Pengusiran Jurnalis dan Penghalangan Kerja Jurnalistik di Pelantikan Wawako Padang itu Tindak Pidana” dan lain-lain.

Pemberitaan yang ada pada berbagai media mengenai dugaan penyalahgunaan wewenang ini tentunya dapat mengancam reputasi dari Biro ADPIM Setdaprov Sumbar di mata masyarakat sehingga terdapat peran dari Bagian Makopim pada Biro ADPIM SetdaProv Sumbar dalam mengelola informasi yang ada agar tidak

berdampak negatif kepada reputasi Pemprov Sumbar melalui kegiatan media relations. Melalui hubungan baik yang dilakukan oleh Biro Adpim dengan media terutama para wartawan, hal tersebut ditindaklanjuti langsung oleh Sekdaprov Sumbar Hansastri yang mewakili pimpinan Sumbar saat menemui para jurnalis dalam unjuk rasa, menyampaikan, Pemprov Sumbar prihatin dan menyesalkan insiden pengusiran jurnalis tersebut. Ia pun memahami aspirasi para jurnalis. Selama ini, jurnalis merupakan mitra kerja untuk menyampaikan informasi pemprov kepada masyarakat, begitu juga sebaliknya. Hal ini menjadi tanda bukti bahwa Biro ADPIM memiliki keterbukaan informasi dalam pemberitaannya, yang diwakili langsung oleh Sekdaprov Sumbar dalam rangka meluruskan permasalahan terkait kasus dugaan penyalahgunaan wewenang oleh seorang staf Biro ADPIM.

Keterbukaan informasi Pemprov Sumbar yang diterapkan oleh Biro ADPIM mendapatkan hasil baik dimana hal ini juga didukung oleh prestasi yang didapatkan oleh Humas Sumbar pada Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023, sebagai Badan Publik dengan kualifikasi Informatif. Prestasi tersebut tidak didapatkan dengan begitu saja, Prestasi ini tidak lepas dari peran aktif Pemprov Sumbar dalam menyukseskan program tersebut. Hal ini juga didukung dengan hubungan baik melalui aktivitas *media relations* antara instansi dengan wartawan yang berdampak pada informasi yang didapatkan oleh masyarakat.

Hubungan *media relations* dari Biro ADPIM yang dikelola langsung oleh Makopim juga terlihat menarik dimana adanya kerja sama pada website dan sosial media Humas Sumbar. Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan terdapat informasi bahwa *website* dan sosial media Humas Sumbar dikelola langsung oleh

staf Biro ADPIM dalam memperbaharui laman berita pada website Humas Pemprov Sumbar yaitu biroadpim.sumbarprov.go.id serta sosial media *Instagram* Humas Sumbar. Namun pada beberapa kasus, wartawan/pers juga terlibat dalam hal publikasi dan dokumentasi kegiatan. Hal tersebut menjadi keunikan sendiri dikarenakan pengelolaan *website* itu sendiri menjadi hal yang biasanya dilakukan oleh instansi sendiri menimbang *website* menjadi hal penting dalam membangun reputasi Pimpinan Sumbar di mata masyarakat.

Pengelolaan pemberitaan yang dilangsungkan dengan bantuan bersama beberapa wartawan ini merupakan hal jarang dilakukan pada suatu instansi. Namun dengan adanya kerja sama antara Setdaprov Sumbar dengan wartawan dengan memberikan akses kepada wartawan untuk dapat ikut serta membantu mengelola *website* berupa penulisan *release* kegiatan pemerintahan. Hal ini bisa menjadi tanda bahwa adanya hubungan baik yang terbentuk melalui kerja sama antara Biro ADPIM dengan media. Dengan adanya kerjasama dengan media, hal tersebut berdampak pada kecepatan penyebaran informasi oleh Biro ADPIM dalam publikasi kegiatan pimpinan kepada publik karena tidak melalui banyak tahapan sehingga dapat diakses langsung oleh pengguna serta meningkatkan citra dan reputasi instansi bagi masyarakat terhadap pimpinan Pemprov Sumbar.

Didasari oleh informasi tersebut, penelitian awal berlanjut dengan temuan fakta bahwa saat ini Biro ADPIM terutama pada Bagian Makopim kekurangan staf humas yang ahli pada bidang peliputan. Terutama untuk penulisan *release* kegiatan Pemerintah Sumbar, hal tersebut berdampak langsung pada kualitas dan kuantitas dari hasil publikasi serta dokumentasi pimpinan. Alasan terkait permasalahan tersebut didapati bahwa tenaga kerja professional terkait

pemberitaan terkhusus pada penulis *release* pemerintahan yang sangat minim berpengaruh kepada hasil dari pemberitaan terkait pimpinan. Dengan adanya kerjasama dengan media seperti ini dapat memudahkan pekerjaan dari Staf Biro ADPIM dalam kegiatan peliputan serta pemberitaan kegiatan pemerintahan.

Media relations berhubungan dengan berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang sama sehingga membuat hubungan kerja sama menjadi menguntungkan antara satu dengan yang lain (Ike Devi. 2005:116). Pada kondisi ini, humas memiliki peran penting untuk memahami pihak-pihak yang memiliki kepentingan bagi instansi seperti media, wartawan serta orang-orang yang juga berada pada bidang media yang tidak dapat diabaikan oleh keduanya. Melalui hubungan *media relations* dapat menjadi sebuah alat dan sebagai bentuk kerja sama dengan media terutama pada wartawan atau pers yang bertujuan untuk melakukan publikasi atau publisitas dari berbagai kegiatan yang ada mengenai program kerja maupun mendukung kelancaran dari aktivitas komunikasi seorang humas dengan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang penelitian ini, didapatkan bahwa *media relations* memiliki peran untuk membentuk citra dan reputasi positif (Darmastuti. 2012). Hal ini dilakukan melalui berbagai upaya serta strategi yang dilakukan dalam meningkatkan hubungan antara instansi dengan media serta keterlibatan jurnalis dalam membentuk serta mempertahankan citra dan reputasi positif dari instansi yang berpengaruh kepada kepercayaan masyarakat.

Adanya pemberitaan miring yang hampir berpengaruh pada reputasi Biro ADPIM Setda prov Sumbar, namun melalui adanya *media relations* yang baik

sehingga hal ini justru menjadi hal positif bagi Biro ADPIM Setda Prov Sumbar dalam rangka membentuk reputasi di masyarakat. Aktivitas inilah yang menjadi acuan bagi peneliti untuk menganalisis aktivitas yang dilakukan oleh Bagian Makopim pada Biro ADPIM Setda Prov Sumbar dalam mempertahankan citra dan reputasi yang ada melalui *media relations*. Berdasarkan hal tersebut peneliti mengangkat penelitian yang berjudul “Aktivitas Media Relation Dalam Membentuk Citra dan Reputasi” (Studi Pada Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan (Makopim) Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat)

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan berfokus kepada aktivitas *media relations* yang dilakukan oleh Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Sumatera Barat pada media seperti wartawan atau pers yang memiliki peran besar dalam menjadi jembatan dalam pemberian informasi kepada masyarakat. Lokasi penelitian ini sendiri dipilih karena Biro Administrasi Pimpinan bertanggung jawab dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dari Humas Provinsi Sumatera Barat, serta dalam hal ini ialah membentuk reputasi di mata masyarakat. Sehingga didapatkan pertanyaan penelitian ini yaitu “Bagaimana pelaksanaan dari aktivitas media relations yang dilakukan oleh Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan membentuk citra dan reputasi dari Pimpinan Sumatera Barat?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka didapatkan tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Mengetahui dan menganalisis aktivitas yang dilaksanakan dalam kegiatan media relations yang dilakukan oleh Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Sumatera Barat dalam membentuk citra dan reputasi.
2. Mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan dalam kegiatan media relations yang dilakukan oleh Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Sumatera Barat dalam membentuk citra dan reputasi.
3. Mengetahui dan menganalisis kendala yang dialami oleh Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Sumatera Barat dalam menjalankan Aktivitas *media relations*.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Melalui penelitian ini diharapkan untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran sebagai bahan kepustakaan tentang aktivitas *media relations* yang dilakukan oleh Humas Pemerintah Daerah, terutama untuk Konsentrasi Humas di Jurusan Ilmu Komunikasi agar bermanfaat di kemudian hari dan dapat dijadikan referensi dan rujukan penelitian.

1.4.2 Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai cara kepada seorang *public relations* atau humas pemerintahan untuk menjalin hubungan baik dengan media yang ada sekaligus memberikan informasi mengenai pentingnya menjalin *media relations* yang baik. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu Biro Administrasi Pimpinan sebagai acuan serta motivasi dalam melaksanakan aktivitas *media relations* agar menjadi lebih baik di masa mendatang.